

## GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : SUARA PEMBARUAN  
Subyek :  
Kata Kunci :

Tgl/Bln/Thn : 12/11/2008  
Hari : Rabu  
Halaman : 01

### Banjir Jakarta 80% Tata Ruang Dilanggar

Sebagian besar pembangunan di Jakarta telah melanggar Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi DKI Jakarta yang dirancang hingga 2010. Pada 2004, tim evaluasi RTRW menyebutkan 80 persen RUTR menyimpang. Perkembangan pembangunan yang pesat di Ibukota hingga kini membuat penyimpangan itu bertambah parah.

Penyimpangan itu, antara lain berupa alih fungsi ruang terbuka hijau dan tempat parkir air, penyempitan kali, dan pelanggaran koefisien dasar bangunan (KDB). Akibatnya, Jakarta kini menjadi kota siaga bencana, khususnya bencana banjir.

Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Jakarta, Yayat Supriatna menyebutkan 90 persen wilayah Jakarta telah terbangun. Hal itu membuat Jakarta menjadi *overload* dan mengalami krisis ruang terbuka hijau (RTH).

"Jakarta telah menjadi kota siaga bencana. Pemprov telah gagal menata Jakarta, termasuk menata permukiman pinggiran sungai. Setiap tahun Pemprov DKI hanya bisa merebokasi sekitar 1.000 kepala di hampir seluruh bantaran kali ke lokasi yang lebih layak. Padahal jumlah penduduk di bantaran kali hampir 70.000 keluarga. Jadi, butuh waktu 70 tahun merelokasi penduduk bantaran kali," katanya kepada *SP*, Selasa (11/11).

Bantaran kali, lanjutnya, dihuni ribuan penduduk miskin kota, sehingga membuat saluran air semakin menyempit. Akibatnya, saat hujan dan banjir kiriman datang, kali di Jakarta tidak mampu menampung luapan air dan banjir pun tak terelakkan. "Jakarta hanya akan dimiliki oleh orang-orang yang memiliki sumber daya ekonomi kuat. Ini yang menjadi masalah besar," tegasnya.

Dikatakan, pesatnya pembangunan permukiman elite di pesisir pantai Jakarta menjadi penyebab berkurangnya tempat parkir air. Pembangunan kawasan permukiman di pesisir pantai telah menyimpang RTRW yang tertuang dalam Peraturan Daerah 6/1999.

"Pemprov DKI memberikan izin pembangunan permukiman di pesisir pantai. Izin yang seharusnya menjadi alat pengendali nyatanya telah menjadi sumber pendapatan asli daerah. Ini sebenarnya tidak boleh terjadi," katanya.

Terkait pelanggaran RTRW, Yayat menyatakan Pemprov harus segera merevisi RTRW yang ada, diikuti dengan pengendalian izin pembangunan. Pemprov juga bisa memberi insentif, keringanan pajak, dan bantuan infrastruktur, bagi warga yang mau memelihara lingkungan sesuai tata ruang.

## **Pengerukan Kali**

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengatakan untuk mengantisipasi banjir, pihaknya berencana mengeruk 13 kali dan lima waduk mulai awal 2009. Pengerukan itu dilakukan secara terintegrasi dengan sumber dana dari bank dunia sekitar Rp 1,2 triliun.

"Pemprov DKI bertanggung jawab menormalisasi kali mikro yang jumlahnya sekitar 35 persen hingga 40 persen dari total panjang kali yang ada. Sisanya tanggung jawab pemerintah pusat," katanya.

Sedangkan, Kepala Dinas Tata Kota DKI Jakarta, Wiriadmoko, mengakui tata kota Jakarta telah berubah akibat pesatnya pembangunan. "Normalisasi kali, pembuatan situ dan waduk, akan menjadi prioritas untuk mengendalikan banjir," katanya.